



PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KEPATUHAN ATAS PERATURAN, DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL)

M. Iqbal Firdaus
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

Alamat Korespondensi: dhilfaizi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
17 Oktober 2016

Dinyatakan Diterima
30 Juli 2018

KATA KUNCI:
Kualitas LKKL, Teknologi Informasi, Kepatuhan atas Peraturan, Kompetensi SDM, *mixed methods*.

KLASIFIKASI JEL:
J24, K42, Q55

ABSTRACT

This research aimed to analyze the influence of information technology implementation, regulatory compliance, and human resource competencies to the quality of LKKL and linked to the policy making process by management in order to improve the quality of LKKL. The perspective of decision usefulness theory is used to interpret the results of this research.

This research took the entire population of the state ministries/institutions. Respondents of this research were minimal echelon IV officials at the level of UAPA in their respective state ministries/agencies. This research used mixed methods by combining quantitative and qualitative approach with the sequential explanatory interpretation strategy. SPSS software version 21 was used to analyze quantitative data, whereas qualitative data analysis used thematic analysis.

The results of this research showed that the implementation of information technology, regulatory compliance, and human resource competencies influenced the quality of LKKL. Management decisions in implementing accrual basis accounting in government financial reporting related to the government's interests on the disclosure of accounting information, which is reflected in the form of rules that must be fulfilled to make the information useful in the context of economic decision making.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan, dan kompetensi SDM terhadap kualitas LKKL dan dikaitkan dengan proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka peningkatan kualitas LKKL. Perspektif teori kegunaan keputusan digunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian ini.

Penelitian ini mengambil populasi kementerian negara/lembaga yang ada. Responden penelitian adalah pejabat minimal eselon IV di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di kementerian negara/lembaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*) dengan mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan strategi *sequential explanatory interpretation*. Software SPSS versi 21 digunakan untuk menganalisis data kuantitatif, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan, dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas LKKL. Keputusan manajemen dalam menerapkan akuntansi basis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah berhubungan dengan kepentingan pemerintah terhadap pengungkapan informasi akuntansi, yang tecermin dalam bentuk kaidah yang harus dipenuhi agar informasi dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi yang berlangsung di Indonesia yang berhasil mengakhiri masa pemerintahan Orde Baru pada akhir tahun 90-an telah membawa pengaruh yang besar dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara yang pada masa sebelumnya cenderung tidak transparan dan akuntabel menjadi salah satu fakta sejarah yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia.

Dalam rangka menjawab tuntutan dan harapan publik tersebut, Pemerintah telah berupaya mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang baik dengan memperhatikan prinsip dan nilai tata kelola pemerintahan yang baik (Nasution, 2003). Salah satu wujudnya adalah dengan diterbitkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara. Paket undang-undang yang menjadi tonggak dimulainya reformasi di bidang keuangan negara ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa untuk mendukung terwujudnya *good governance*, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disusun oleh pemerintah pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun oleh pemerintah daerah.

Ruang lingkup LKPP mencakup seluruh bagian anggaran yang dikelola oleh entitas pemerintah pusat, yaitu terdiri dari entitas kementerian negara/lembaga dan entitas Bendahara Umum Negara (BUN). Saat ini terdapat 87 (delapan puluh tujuh) entitas kementerian negara/lembaga dan 1 (satu) entitas Bendahara Umum Negara (BUN), dan masing-masing entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berupa Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) untuk kementerian negara/lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) untuk entitas BUN. LKPP itu sendiri disusun dengan mengkonsolidasikan seluruh LKKL yang ada dengan LKBUN.

Salah satu indikator yang merefleksikan kualitas laporan keuangan Pemerintah adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPP sampai dengan LKPP TA 2015, masih terdapat beberapa permasalahan terkait kewajaran penyajian laporan

keuangan. BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) untuk LKPP tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, dan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk LKPP tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.

Kondisi ini juga berlaku untuk LKKL yang merupakan bagian integral dari LKPP. Sejak pertama kali diberikan opini oleh BPK pada tahun 2006, opini BPK terhadap LKKL sangat bervariasi. Untuk tahun 2015, hasil pemeriksaan atas 85 LKKL menunjukkan terdapat 56 LKKL yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 25 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 4 LKKL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Adapun LKKL yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 56 LKKL dan yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 25 LKKL.

Tabel 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga

Opini BPK atas LKKL	Tahun									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	7	16	35	42	50	61	62	65	62	56
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	38	31	31	24	25	17	22	19	17	25
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	36	33	18	7	2	2	3	2	7	4
Tidak Wajar (TW)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	81	81	84	73	77	80	87	86	86	85

sumber: LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2015, diolah

Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah di tahun 2015 terkait dengan pelaporan keuangan adalah pemenuhan amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah. Tantangan selanjutnya yaitu diterapkannya sistem manajemen keuangan yang baru, yang bisnis prosesnya sejalan/sesuai dengan penerapan akuntansi berbasis akrual. Sistem manajemen keuangan tersebut yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SPAN dijalankan dan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN sedangkan SAKTI dijalankan oleh kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran/barang. Sampai dengan pertengahan tahun 2016, SPAN sudah dijalankan secara penuh di internal Kementerian Keuangan dan SAKTI dalam proses *piloting* di masing-masing satuan kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia.

Berbagai tantangan tersebut haruslah dapat diantisipasi secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan yang tepat dan sesuai, sehingga dapat mengeliminir berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara. Penentuan dan penetapan kebijakan oleh pemerintah tersebut perlu didukung dengan basis data dan riset/penelitian yang memadai, sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat tepat sasaran dan efektif untuk mengatasi segala permasalahan yang ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam dunia bisnis, tidak terkecuali dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Pemerintah pusat memanfaatkan teknologi informasi dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui penggunaan berbagai aplikasi yang memudahkan para operator di masing-masing instansi dalam menyajikan dan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan berguna bagi para *stakeholders*. Aplikasi-aplikasi tersebut dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah yang memperoleh dana APBN.

Kondisi yang kerap kali menjadi permasalahan adalah masing-masing aplikasi tersebut berdiri sendiri (*stand alone*) dan memiliki *database* yang terpisah, namun interaksi data baik input maupun *outputnya* saling berkaitan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Hal ini seringkali menyebabkan berbagai permasalahan di lapangan, antara lain tidak cocoknya hasil *output* aplikasi satu dengan yang lainnya, tidak sempurnanya proses migrasi/transfer/penerimaan data antara aplikasi satu dengan yang lainnya, duplikasi data, hingga kesulitan dalam memverifikasi data dan dokumen sumber karena untuk dokumen sumber yang sama dicatat berulang-ulang di aplikasi yang berbeda.

Salah satu kriteria yang ditetapkan oleh BPK dalam pemberian opini atas laporan keuangan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mewajibkan pemeriksa untuk merancang pemeriksaan yang dapat memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Karena pengaruhnya yang krusial dalam penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, manajemen/pengambil keputusan di masing-masing kementerian negara/lembaga harus dapat menjamin bahwa entitas yang dikelolanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas segala aktivitasnya. Tanggung jawab ini mencakup kegiatan pengidentifikasian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyusunan pengendalian intern yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa entitas tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut.

Faktor fundamental lain yang mempengaruhi kualitas LKKL adalah kompetensi SDM. Dalam konteks akuntansi dan pelaporan pemerintah, SDM

merupakan agen perubahan yang berperan penting dalam mendukung pelaporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Peningkatan kompetensi SDM bertujuan untuk memperoleh SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sebagai kunci implementasi reformasi pengelolaan keuangan negara. Realita yang ada di pemerintah pusat adalah SDM yang tersebar di masing-masing instansi cenderung belum memiliki kompetensi yang memadai dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan, belum jelasnya pola rekrutmen/mutasi pegawai, dan masing-masing instansi pemerintah belum memiliki sistem pengembangan kompetensi SDM yang seragam. Aspek peningkatan kompetensi SDM juga harus dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan atas pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* serta melalui pengembangan konsep dan regulasi yang sesuai dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan yang baik pada pemerintah.

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, antara lain dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Sukmaningrum (2012), Sugandi, dkk (2013), dan Nugraha (2015), hanya terbatas pada satu instansi pemerintah saja, sehingga hasilnya belum tentu relevan dan sesuai untuk instansi lainnya. Sementara itu, masing-masing entitas pemerintah yang ada saat ini memiliki karakteristik yang beragam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepatuhan atas Peraturan, dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Penelitian ini mengambil obyek penelitian seluruh entitas kementerian negara/lembaga lingkup pemerintah pusat yang sangat beragam karakteristiknya, antara lain dilihat dari sisi organisasi, luas wilayah kerja, kapasitas SDM, jumlah dana yang dikelola, dan sebagainya. Analisis dilakukan dengan menggunakan data populasi yang mewakili kementerian negara/lembaga secara keseluruhan.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Laporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan memegang peranan penting dalam proses penyampaian informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas. Dewan Akuntansi Sektor Publik (*Public Sector Accounting Board/PSAB*, 2003) menjelaskan bahwa dalam konteks pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah adalah kunci untuk melaporkan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik. Sebagai bagian dari pelaporan pemerintah secara umum, laporan keuangan pemerintah merupakan komponen fundamental.

Harun (2009) menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan alat akuntabilitas utama pemerintah kepada wakil-wakil rakyat di parlemen atau lembaga-lembaga lain yang berkepentingan, serta masyarakat umum. Hal ini selaras dengan yang dijelaskan Mardiasmo (2005) bahwa *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) dalam Pernyataan Konsep Nomor 1 tentang Tujuan Pelaporan Keuangan menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan.

Dalam konteks Indonesia, laporan keuangan pokok berbasis akrual penuh yang disusun oleh pemerintah meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal itu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2014, LKPP masih menganut basis *Cash-Toward-Akrual* (CTA), yaitu mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai komponen dari Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas, dan mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca dengan basis akrual. Adapun laporan keuangan yang berbasis akrual dalam entitas pemerintah mulai diterapkan pada pelaksanaan anggaran tahun 2015.

2.2. Teori Kegunaan Keputusan (*Decision Usefulness Theory*)

Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*).

Financial Accounting Standard Boards (FASB) menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari

kesalahan dan bias, dan mewakili apa yang akan digambarkan. Agar relevan, informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan.

FASB menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi investor, kreditur, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenis maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapannya.

Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictive-value*), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam SFAC No. 2. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan.

Empat hal tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan IASB (2003:69) dalam Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (*International Public Sector Accounting Standards/IPSAS*) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Lampiran A Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan. IASB menyatakan bahwa karakteristik kualitatif adalah atribut yang membuat informasi yang tersedia dalam laporan keuangan bermanfaat untuk para pengguna. Empat prinsip karakteristik kualitatif tersebut adalah dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

2.3. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat (SAPP)

Berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.05/2013, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat (SAPP) merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Penerapan SAPP ini merupakan bagian dari amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara.

Hasil keluaran dari proses SAPP berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP ini disampaikan kepada DPR sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP tersebut terlebih dahulu direviu oleh Aparat Pengawasan Intern dan diaudit oleh BPK. LKPP yang dihasilkan dari proses SAPP paling sedikit berupa: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan pula bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. Kementerian negara/lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan. Dalam pelaksanaan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada SAI, terdiri dari:

- 1) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA);
- 2) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran- Eselon1 (UAPPA-E1);
- 3) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran- Wilayah (UAPPA-W); dan
- 4) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Sedangkan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN pada SAI, terdiri dari:

- 1) Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB);
- 2) Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang-Eselon1 (UAPPB-E1);
- 3) Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W); dan
- 4) Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan lingkup kementerian negara/lembaga dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas.

Hasil akhir dari proses akuntansi dalam SAI adalah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), yang nantinya akan dikonsolidasikan dengan LKBUN menjadi LKPP. Masing-masing Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada kementerian negara/lembaga menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan

Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LKKL yang telah disusun melalui proses akuntansi selanjutnya direviu oleh aparat pengawasan intern yang terdapat pada kementerian negara/lembaga. Apabila kementerian negara/lembaga belum memiliki aparat pengawas intern, sekretaris jenderal/pejabat yang setingkat menunjuk seorang atau beberapa orang pejabat di luar biro/bidang keuangan untuk melakukan reviu atas laporan keuangan. Reviu tersebut dilaksanakan atas LKKL (termasuk Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu.

LKKL tahunan disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direviu yang ditanda tangani oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga.

2.4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

2.4.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi (TI) merupakan salah satu bagian integral dari teknologi. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat cepat dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Teknologi informasi sangat membantu sistem akuntansi yang diterapkan oleh entitas pemerintah, dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terkomputerisasi dapat mendorong perkembangan kinerja pemerintah.

Pemanfaatan teknologi informasi membuat aliran informasi menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga memperkuat pengambilan keputusan manajerial. Hal ini akan meningkatkan kemampuan entitas pemerintah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Namun demikian, teknologi informasi diterapkan terkadang tidak sempurna, sehingga pemilihan sistem yang cocok (*compatible*) menjadi hal krusial yang harus dilakukan. Satu hal penting yang juga harus diperhatikan adalah bahwa kemajuan teknologi informasi tidak lantas menggantikan peran manusia dalam sistem akuntansi secara keseluruhan (Lim, 2013).

Pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai pada masing-masing entitas kementerian negara/lembaga diharapkan dapat mengeliminir segala bentuk kendala yang dihadapi kementerian negara/lembaga dalam menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada *stakeholders*, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas LKKL yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan sesuai diharapkan dapat mendorong kualitas LKKL dengan tentunya tidak menggantikan peran manusia dalam sistem akuntansi secara keseluruhan.

2.4.2. Kepatuhan atas Peraturan

Salah satu indikator yang merefleksikan kualitas LKKL adalah opini BPK atas laporan keuangan. Pemberian opini BPK didasarkan pada beberapa kriteria, salah satunya adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mewajibkan pemeriksa untuk merancang pemeriksaan yang dapat memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan keuangan dimuat dalam laporan atas kepatuhan. Apabila pemeriksa menerbitkan laporan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus memuat suatu paragraf yang merujuk kepada laporan tersebut. Dengan banyaknya temuan dalam LKKL terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengindikasikan bahwa masih banyak entitas kementerian negara/lembaga yang belum bisa menjamin bahwasanya entitas yang dikelolanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas segala aktivitasnya, dan dalam hal ini entitas kementerian negara/lembaga juga belum bisa menjamin bahwa pengendalian intern yang dijalankan telah memberikan keyakinan memadai bahwa entitas tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut.

2.4.3. Kompetensi SDM

SDM adalah faktor yang penting dalam organisasi modern, tak terkecuali organisasi pemerintah. Mayoritas permasalahan dalam sebuah organisasi adalah manusia dan sosial dibanding dengan fisik, teknis, atau ekonomi. Kegagalan dalam mengidentifikasi fakta ini mengakibatkan kerugian besar bagi negara, perusahaan, maupun individu. Produktivitas berasosiasi secara nyata dengan sifat sumber daya manusia dan keseluruhan lingkungannya yang terdiri dari faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi (politik, agama, budaya, sosiologi, dan psikologi) yang saling terhubung, saling bergantung, dan saling berinteraksi (Mahapatro, 2010).

Menurut Taylor (1911, dalam Gudono, 2014a:37), ada lima buah pokok pikiran manajemen ilmiah dan dua di antaranya terkait dengan faktor SDM, yaitu pemilihan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan dan pelatihan karyawan untuk dapat melakukan pekerjaan secara efisien. Pemilihan orang yang tepat dalam melakukan pekerjaan dan pelatihan karyawan dapat menunjang kinerja dan produktivitas organisasi, sehingga tujuan dan cita-cita organisasi dapat tercapai.

Pemilihan orang yang tepat dalam melakukan suatu pekerjaan erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan dan seberapa besar pengetahuan dan

keahlian yang dimiliki dalam menunjang keberhasilan suatu pekerjaan yang diemban, dan pelatihan karyawan dalam hal ini tentu saja dapat memupuk pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh karyawan, sehingga keberhasilan pekerjaan yang diemban dapat terealisasi dengan lebih mudah.

Demikian pula halnya dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, apabila ditunjang dengan sumber daya manusia yang tepat (dari sisi latar belakang pendidikan dan pengetahuan/keahlian) dan disertai dengan program pelatihan yang *massif* dan menyeluruh di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, tentu saja dapat mendorong tercapainya pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel dan dapat memenuhi syarat kualitatif laporan keuangan yang baik.

2.5. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap kualitas LKKL.
- H2 : Kepatuhan atas peraturan berpengaruh secara positif terhadap kualitas LKKL.
- H3 : Kompetensi SDM berpengaruh secara positif terhadap kualitas LKKL.
- H4 : Pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan dan kompetensi SDM secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas LKKL.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*explanatory/correlational study*). Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan suatu fenomena dalam bentuk hubungan kausalitas antar variabel melalui pengujian hipotesis (Cooper dan Schindler, 2011). Pengujian hipotesis menggunakan model prediksi yang bertujuan menguji efek prediksi antar variabel untuk melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antar variabel tersebut atau tidak.

Metode penelitian campuran (*mixed method*) digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian campuran menurut Creswell dan Clark (2011) merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Creswell dan Clark (2011) juga menjelaskan bahwa ketika suatu metode penelitian belum mencukupi untuk menjelaskan suatu fenomena dan dibutuhkan metode tambahan, maka pendekatan metode campuran sangat berguna. Metode penelitian campuran (*mixed method*) dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *Sequential Explanatory Interpretation Method*. Creswell dan Clark (2011) mengemukakan bahwa pendekatan metode *sequential* merupakan suatu prosedur penelitian dimana peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode yang lain yang dikombinasikan secara berurutan. Kemudian pendekatan *Sequential*

Explanatory Interpretation Method merupakan metode campuran dengan interpretasi hasil kalkulasi metode kuantitatif dilanjutkan dengan metode kualitatif agar interpretasi hasil penelitian melalui metode kuantifikasi dengan uji hipotesis didukung dengan hasil wawancara (Creswell dan Clark, 2011).

Untuk tahap awal, metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis secara empiris pengaruh faktor-faktor pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan, dan kompetensi SDM terhadap kualitas LKKL. Analisis kuantitatif dilakukan melalui pengujian hipotesis yang telah dikembangkan dengan mengolah data primer hasil kuesioner dan didukung dengan teknik analisis diskriptif dan analisis regresi berganda.

Hasil sementara yang diperoleh dengan metode kuantitatif tersebut dilanjutkan dengan metode kualitatif yang bertujuan memperkuat hasil analisis kuantitatif agar didapatkan kesimpulan yang jelas dan akurat. Metode kualitatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena kompleks dan dinamis yang mungkin tidak tertangkap dalam hasil analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) kepada para pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Hasil wawancara ditranskripsi kemudian dilakukan analisis tematik untuk memperoleh deskripsi tentang tema utama dari poin-poin wawancara yang dilakukan.

Grafik 1. Metodologi Penelitian



Penelitian ini menggunakan sumber data berupa opini, sikap, atau pengalaman responden atas karakteristik populasi yang menjadi subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh entitas kementerian negara/lembaga lingkup pemerintah pusat yang ada di Indonesia. Saat ini terdapat 87 (delapan puluh tujuh) entitas kementerian negara/lembaga yang masing-masing satuan kerjanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Penelitian ini mengambil keseluruhan populasi yang ada untuk dilakukan survei dengan pertimbangan agar mampu memberikan gambaran secara utuh karakteristik seluruh populasi yang ada, dan hasil dari penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang mengemuka terkait dengan kualitas LKKL.

Untuk mendukung analisis secara kuantitatif, responden dalam penelitian ditetapkan dengan kriteria pegawai/pejabat penyusun laporan keuangan di tingkat UAPA (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran)

yang menduduki jabatan minimal eselon IV di masing-masing populasi yang ada. Penetapan tingkat UAPA sebagai unit analisis dengan pertimbangan bahwa UAPA merupakan unit tertinggi di masing-masing entitas yang mengkonsolidasi seluruh laporan keuangan yang disusun oleh oleh masing-masing satuan kerja di bawahnya menjadi LKKL. Selanjutnya data kuesioner yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*) dengan menggunakan *software SPSS versi 21*.

Kemudian untuk analisis secara kualitatif, informan ditetapkan dalam rangka mendukung hasil analisis kuantitatif yang telah dilakukan sebelumnya. Informan ditetapkan dalam rangka memperoleh informasi lebih mendalam terhadap temuan-temuan pada tahap kuantitatif yang membutuhkan penjelasan tambahan, misalnya perbedaan statistik dalam kelompok, responden yang menempati tingkatan skor ekstrim, atau terdapat hasil yang tidak dapat terprediksikan.

Analisis data dengan regresi linier berganda mencakup pengujian kualitas data penelitian, analisis statistik deskriptif penelitian, dan pengujian hipotesis penelitian yang meliputi penaikan skala data dengan *Method of Successive Interval (MSI)*, uji asumsi klasik, dan uji statistik. Hasil analisis kuantitatif tersebut kemudian diperkuat dengan analisis kualitatif berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap hasil analisis kuantitatif yang membutuhkan klarifikasi dan konfirmasi lebih lanjut.

4. HASIL PENELITIAN

Analisis data penelitian dilakukan melalui pengolahan data primer yang diperoleh baik dari instrumen kuesioner yang dihimpun pada tahap awal, maupun dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang berkompeten pada tahap selanjutnya.

Responden penelitian ini adalah pejabat minimal eselon IV di tingkat UAPA masing-masing kementerian negara/lembaga yang menurut pertimbangan penulis memiliki informasi dan pemahaman yang memadai di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, termasuk pemahaman terhadap kualitas LKKL yang mereka susun dan sajikan.

Tabel 2. Gambaran Umum Responden

No.	Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Jenis kelamin	Laki-Laki	57	67,06
		Perempuan	28	32,94
2	Usia	≤ 30 tahun	0	0,00
		31 – 40 tahun	10	11,76
		41 – 50 tahun	48	56,47
		≥ 51 tahun	27	31,76
3	Pendidikan terakhir	≤ SMA/ sederajat	0	0,00
		Diploma I – III	0	0,00
		S1/Diploma IV	36	42,35
		S2	49	57,65
		S3	0	0,00
4	Bidang pendidikan terakhir	Ilmu Ekonomi	14	16,47
		Manajemen	25	29,41
		Akuntansi	31	36,47
		Ilmu Komputer/TI	8	9,41
		Teknik	2	2,35
		Hukum	3	3,53
		Lainnya	2	2,35

Sumber: Data kuesioner, diolah

Sedangkan untuk analisis secara kualitatif, telah dilakukan wawancara secara mendalam terhadap informan-informan sebagai berikut:

- 1) Kasubdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara (BAIBUN), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK). Beliau adalah pimpinan unit eselon III lingkup Dit. APK, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya antara lain melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk serta menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian negara/lembaga yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.
- 2) Ketua Pokja D.1. Tim Pembina Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Percepatan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Bendahara Umum Negara. Beliau merupakan ketua kelompok kerja tim pembina yang tugas fungsinya antara lain melaksanakan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, memberikan rekomendasi/pemecahan atas masalah yang dihadapi, dan menelaah kewajaran laporan keuangan kementerian negara/lembaga di bawah binaannya. Beliau membawahi enam entitas kementerian negara/lembaga, yaitu: 1) Kejaksaan RI; 2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; 4) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 5) Komisi Pemilihan Umum; dan 6) Kementerian BUMN.
- 3) Ketua Pokja D.2. Tim Pembina Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Percepatan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Bendahara Umum Negara. Beliau merupakan ketua kelompok kerja tim pembina yang tugas fungsinya antara lain melaksanakan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, memberikan rekomendasi/pemecahan atas masalah yang dihadapi, dan menelaah kewajaran laporan keuangan kementerian negara/lembaga di bawah binaannya. Beliau membawahi lima entitas kementerian negara/lembaga, yaitu: 1) Kementerian Hukum dan HAM; 2) Lembaga Ketahanan Nasional; 3) Dewan Perwakilan Daerah; 4) Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan 5) Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 4) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Akuntansi dan Pelaporan, Bagian Keuangan, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Beliau adalah pejabat eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang mengawal penyusunan dan penyajian LKKL Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain konsolidasi laporan keuangan tingkat UAKPA, pemeriksaan BPK atas LKKL, dan mengawal tindak lanjut temuan BPK atas LKKL. Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan belum pernah memperoleh opini terbaik dari BPK atas

pemeriksaan keuangan. Kementerian ini memperoleh opini WDP dari tahun 2008-2013, memperoleh opini TMP di tahun 2014, dan kembali memperoleh opini WDP di tahun 2015.

- 5) Kasubag Perbendaharaan, Bagian Keuangan, Biro Umum, Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Beliau adalah pejabat eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang membawahi fungsi perbendaharaan (pelaksanaan anggaran) dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan lingkup Komnas HAM. Sebagai informasi, Komnas HAM merupakan entitas pelaporan yang cenderung tidak terlalu besar, yakni hanya memiliki satu satuan kerja setingkat UAKPA dan satu UAPPA-E1. Komnas HAM memiliki beberapa perwakilan di daerah, namun bukan berupa satuan kerja dan untuk pengelolaan keuangannya diangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di masing-masing perwakilan. Komnas HAM memperoleh opini terbaik dari BPK atas pemeriksaan keuangan tahun 2011-2014, namun untuk tahun 2015 Komnas HAM memperoleh opini TMP karena adanya kelemahan sistem pengendalian internal.

Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Analisis statistik deskriptif memberikan hasil bahwa dari empat prasyarat karakteristik kualitatif tersebut ternyata kriteria dapat dibandingkan memiliki skor tertinggi dan kriteria dapat dipahami memiliki skor terendah dalam penilaian kualitas LKKL.

Secara umum opini audit BPK atas LKKL dapat dijadikan indikator kualitas LKKL, walaupun sebenarnya opini itu sendiri tidak semata-mata hanya ditentukan oleh hasil audit, tetapi ada faktor-faktor lain yang berpengaruh. Tekanan-tekanan publik saat ini ditengarai juga berpengaruh terhadap sikap dan mental BPK dalam memberikan opini. Jika sebelumnya BPK hanya memberikan opini hanya semata-mata berdasarkan hasil audit dan teknis akuntansi, tapi saat ini BPK sudah mulai melebarkan *scope* pemberian opini tidak semata-mata hanya dari kualitas penyusunan LKKL secara teknis akuntansi, tetapi lebih kepada akuntabilitas masing-masing entitas kementerian negara/lembaga.

Hasil analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas LKKL. Hasil penelitian ini sejalan dengan Bodnar dan Hopwood (1995) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi, baik itu yang bersifat finansial atau non finansial, yang dalam penelitian ini antara lain

diwujudkan dalam LKKL. Penelitian ini sejalan pula dengan William dan Sawyer (2007) yang menyatakan bahwa teknologi informasi membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi, yang antara lain diwujudkan dalam LKKL.

Aliran data dan informasi yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dan penyajian LKKL memperkuat pengambilan keputusan manajerial di masing-masing kementerian negara/lembaga melalui manfaat umpan balik, manfaat perdictif, ketepatanwaktuan, dan kelengkapan informasi yang diberikan dalam LKKL. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dan penyajian LKKL juga berpengaruh terhadap keandalan data dan informasi yang disajikan dalam LKKL, karena masing-masing transaksi dapat lebih mudah untuk ditelusuri dan diverifikasi kebenarannya melalui aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Statistik deskriptif penelitian ini juga membuktikan bahwa ternyata di sebagian kementerian negara/lembaga, pemanfaatan teknologi informasi kurang didukung oleh jaminan pemeliharaan yang memadai. Jaminan pemeliharaan ini termasuk pengecekan secara rutin, ketersediaan SOP yang dijalankan dengan baik, dan yang tidak kalah penting adalah menyangkut ketersediaan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa bagian akuntansi dan pelaporan keuangan saat ini belum dianggap sebagai bagian yang prioritas di instansi, berbeda dengan bagian perencanaan atau pelaksanaan anggaran, atau bagian teknis lainnya.

Terkait dengan kepatuhan atas peraturan, hasil analisis regresi yang telah dilakukan juga menunjukkan kesimpulan bahwa kepatuhan atas peraturan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas LKKL. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nagy (2010) atas pengaruh tingkat kepatuhan terhadap SOX Section 404 terhadap kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik pada entitas perusahaan di New Zealand, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tingkat kepatuhan terhadap SOX 404 dengan kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Untuk sektor pemerintah di Indonesia, penelitian ini sejalan dengan penelitian Desi Fatimah *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kasus kerugian daerah/perusahaan dan penyimpangan administrasi serta opini audit tahun sebelumnya yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan opini WTP.

Hasil analisis penelitian ini yang mengkonfirmasi pengaruh yang signifikan variabel kepatuhan atas peraturan terhadap variabel kualitas LKKL diperkuat dengan ketentuan bahwa kepatuhan terhadap peraturan dijadikan salah satu kriteria yang ditetapkan oleh BPK dalam pemberian opini atas laporan keuangan, selain kesesuaian dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Statistik deskriptif penelitian ini juga membuktikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ternyata memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan dengan kepatutan.

Terkait dengan kompetensi SDM, hasil analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan kesimpulan bahwa kompetensi SDM berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas LKKL. Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep Manajemen Ilmiah yang dikembangkan oleh Taylor (1911) dalam Gudono (2014a:37). Taylor (1911) menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) buah pokok pikiran manajemen ilmiah menurut, dan 2 (dua) di antaranya terkait dengan faktor SDM, yaitu pemilihan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan dan pelatihan karyawan untuk dapat melakukan pekerjaan secara efisien.

Hasil penelitian ini ternyata juga mengkonfirmasi bahwa sebagian besar responden menjawab bahwa instansi yang seringkali melakukan rotasi/mutasi pegawai menghambat penyusunan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pola rotasi/mutasi pegawai di sebagian instansi belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi/situasi/kebutuhan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, yang antara lain dapat dilihat pada ketiadaan kaderisasi penyusun laporan keuangan, rotasi/mutasi yang berdekatan dengan siklus penyusunan laporan keuangan, dan kualitas/kuantitas SDM yang belum cukup memadai di bidang tersebut.

Terkait dengan pengaruh simultan variabel-variabel bebas yang diteliti terhadap kualitas LKKL sebagai variabel terikat, hasil analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan dan kompetensi SDM secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas LKKL. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan ketiga variabel bebas yang terdiri dari pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan dan kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKKL sebesar 43,8 persen, sedangkan 56,2 persen lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti yang mempengaruhi kualitas LKKL. Hal ini menunjukkan bahwa selain ketiga variabel tersebut masih terdapat lagi variabel-variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKKL.

Kualitas LKKL yang antara lain dapat ditunjukkan melalui opini BPK sebenarnya tidak semata-mata dipengaruhi oleh teknis penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik dan kompetensi SDM yang memadai di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kualitas LKKL apabila tidak didukung oleh kualitas perencanaan dan kualitas pelaksanaan anggaran yang baik di tahun berkenaan.

Selain itu, komitmen pimpinan beserta seluruh pelaku pengelola keuangan negara membawa pengaruh besar dalam upaya meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tanpa komitmen yang baik di tingkat manajemen puncak, hampir mustahil tercapai komitmen organisasi yang solid terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Pimpinan kementerian negara/lembaga beserta seluruh jajarannya harus pro aktif dalam menumbuhkan komitmen pada setiap aktivitasnya dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor yang dominan pengaruhnya terhadap kualitas LKKL bila dibandingkan dengan kedua faktor yang lain karena penggunaan berbagai macam aplikasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan kontribusinya sangat besar terhadap tingkat informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Berbagai aplikasi tadi sangat memudahkan penyusunan laporan keuangan, khususnya para operator aplikasi di masing-masing satuan kerja dalam menghasilkan komponen-komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan, yaitu mulai dari LRA, LO, neraca, LPE, sampai dengan CaLK.

Peningkatan kompetensi SDM diperlukan dalam peningkatan kualitas LKKL. Penerapan akuntansi berbasis aktual dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan menuntut SDM penyusun laporan keuangan di masing-masing instansi untuk terus belajar dan berlatih dalam memahami konsep akuntansi akrual itu sendiri dan mengoperasikan aplikasi serta menilai dan meyakini laporan keuangan yang dihasilkan tersebut sudah benar atau belum. Meskipun telah didukung dengan kemudahan dalam pengoperasian serta alur proses aplikasi yang mudah dimengerti, namun penting pula bagi para penyusun keuangan dalam meyakini kebenaran laporan yang telah dibuatnya. Para pimpinan juga dituntut untuk dapat memahami dan menilai laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh para penyusun laporan keuangan.

Dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, maka sudah seharusnya kepatuhan atas kebijakan/sistem/peraturan tersebut menjadi hal yang diutamakan. Peraturan dibuat sedemikian ketat, namun dengan tetap mengedepankan peran-peran yang diberikan negara kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip "*let's the manager manage*".

Terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, Kementerian Keuangan selaku regulator dalam penyusunan LKKL telah menetapkan berbagai macam peraturan di semua lini mulai dari kebijakan, sistem akuntansi sampai dengan penyajian LKKL yang sejalan dengan SAP. Apabila seluruh kementerian negara/lembaga beserta seluruh jajaran satuan kerja dibawahnya mematuhi segala aturan yang telah dibuat tersebut, maka otomatis LKKL yang dihasilkan juga akan lebih berkualitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan, dan kompetensi SDM terhadap kualitas LKKL. Untuk mengkonfirmasi hubungan tersebut dikembangkan 4 (empat) hipotesis penelitian. Hasil pengujian hipotesis berdasarkan model penelitian secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKKL. Kesimpulan ini diperoleh melalui hasil analisis kuantitatif yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKKL. Hal ini didukung pula dengan hasil wawancara yang mengkonfirmasi hasil kuantitatif tersebut bahwa penggunaan berbagai macam aplikasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan kontribusinya sangat besar terhadap tingkat informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Berbagai aplikasi tersebut memudahkan penyusunan laporan keuangan dalam menghasilkan komponen-komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan.
- 2) Kepatuhan atas peraturan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKKL. Kesimpulan ini diperoleh melalui hasil analisis kuantitatif yang membuktikan bahwa kepatuhan atas peraturan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKKL. Hal ini didukung pula dengan hasil wawancara yang mengkonfirmasi hasil kuantitatif tersebut bahwa Kementerian Keuangan selaku regulator dalam penyusunan LKKL telah menetapkan berbagai macam peraturan di semua lini mulai dari kebijakan, sistem akuntansi sampai dengan penyajian LKKL yang sejalan dengan SAP. Apabila seluruh kementerian negara/lembaga beserta seluruh jajaran satuan kerja dibawahnya mematuhi segala aturan yang telah dibuat tersebut, maka otomatis LKKL yang dihasilkan juga akan lebih berkualitas.
- 3) Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKKL. Kesimpulan ini diperoleh melalui hasil analisis kuantitatif yang membuktikan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKKL. Hal ini didukung pula dengan hasil wawancara yang mengkonfirmasi hasil kuantitatif tersebut bahwa penerapan akuntansi berbasis aktual dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal menuntut SDM penyusun laporan keuangan di masing-masing instansi untuk terus belajar dan berlatih dalam memahami konsep akuntansi akrual itu sendiri dan mengoperasikan aplikasi serta menilai dan meyakini laporan keuangan yang dihasilkan tersebut sudah benar atau belum.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan dan kompetensi SDM secara simultan berpengaruh terhadap kualitas LKKL.

Kesimpulan ini diperoleh melalui hasil analisis kuantitatif yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan dan kompetensi SDM secara simultan berpengaruh terhadap kualitas LKKL. Terkait dengan pengaruh ketiga faktor yang diteliti tidak dominan pengaruhnya terhadap kualitas LKKL, hasil wawancara mengkonfirmasi bahwa kualitas LKKL tidak semata-mata dipengaruhi oleh ketiga faktor yang diteliti dan teknis penyusunan laporan keuangan. Kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, komitmen pimpinan dan seluruh pengelola keuangan negara, serta hubungan yang harmonis diantara masing-masing pengelola keuangan negara diduga ikut berpengaruh terhadap kualitas LKKL.

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di institusi terkait. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

(1) Bagi kementerian negara/lembaga dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan guna meningkatkan kualitas LKKL di masa mendatang. Langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas LKKL melalui perspektif lain yang dapat menggambarkan kualitas laporan keuangan, yaitu kebermanfaatan LKKL dalam pengambilan keputusan. Peningkatan aspek kebermanfaatan LKKL dilakukan dalam konteks akuntabilitas internal, evaluasi kinerja internal, dan proses pengambilan keputusan. Penguatan akuntabilitas internal dilakukan dengan peningkatan koordinasi dari entitas akuntansi yang paling rendah (UAKPA) sampai dengan tingkat pusat (UAPA). Sementara itu, dalam hal evaluasi kinerja keuangan, LKKL seharusnya dapat digunakan sebagai input untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Dari sisi pengambilan keputusan, penggunaan informasi dalam LKKL dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- Peningkatan kualitas LKKL melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, peningkatan komitmen pimpinan, dan juga koordinasi yang lebih baik dalam hal aliran data keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Peningkatan komitmen pimpinan terutama dalam konteks praktis (implementasi), sehingga dapat menjadi katalisator bagi komitmen

organisasi secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan kualitas LKKL.

- Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin muktahir harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di masing-masing satuan kerja yang diikuti dengan jaminan pemeliharaan yang memadai. Selain itu dukungan anggaran juga diperlukan bagi masing-masing kementerian negara/lembaga dalam mengupayakan agar teknologi informasi yang digunakan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin;
- Pentingnya kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap lini aktivitas pengelolaan keuangan negara dalam upaya meningkatkan kualitas LKKL dapat dilakukan melalui komitmen pimpinan dan seluruh jajaran di bawahnya untuk taat pada aturan hukum yang berlaku, meningkatkan sistem pengendalian internal, dan meningkatkan frekuensi pelatihan yang fokus pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam upaya menurunkan tingkat *fraud*/kecurangan dalam pengelolaan keuangan;
- Perbaikan pola pengembangan kompetensi SDM penyusun laporan keuangan yang efektif melalui perbaikan pola mutasi/rotasi pegawai yang mempertimbangkan kebutuhan SDM penyusun laporan keuangan, kaderisasi penyusun laporan keuangan, perubahan stigma negatif pegawai terhadap bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pembagian tugas yang efektif;
- Kekurangan ketersediaan SDM penyusun laporan keuangan dapat diantisipasi dengan penerimaan pegawai di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui rekrutmen khusus. Dan jika SDM-nya sudah memadai, maka harus mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki terhadap perkembangan teknologi informasi yang digunakan dan perkembangan kompleksitas peraturan terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- Persiapan dan penguatan koordinasi dalam menghadapi perubahan kebijakan dan sistem terkait implementasi basis akrual dan SPAN/SAKTI. Penguatan koordinasi berhubungan dengan transfer *skill* dan teknologi sehingga tujuan perubahan untuk penyempurnaan pengelolaan keuangan dapat terwujud.

(2) Bagi Kementerian Keuangan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu:

- Penguatan fungsi pembinaan kementerian negara/lembaga di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan melalui perbaikan pola pembinaan dan pendampingan laporan keuangan, tentunya dengan memperhatikan karakteristik dan permasalahan kementerian negara/lembaga yang beragam;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan/sistem akuntansi yang selama ini belum/kurang jelas diatur dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual, sehingga tidak menjadi kendala bagi kementerian negara/lembaga dalam mengakui, mengukur, dan mencatat berbagai transaksi yang ada sesuai dengan dokumen sumber yang dipersyaratkan;
- Penguatan infrastruktur pendukung SPAN/SAKTI terutama berhubungan dengan pemeliharaan *database*. Selain itu, diperlukan formulasi sistem transfer *skill* dan *knowledge* yang efektif untuk mendukung masa transisi kebijakan dan sistem.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Selanjutnya, penelitian ini juga mempunyai berbagai keterbatasan dan atas segala keterbatasan tersebut dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang meneliti dengan tema serupa dalam upaya penyempurnaan penelitian. Adapun keberbatasan dan saran yang dapat disampaikan kepada peneliti-peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*) dengan pendekatan *Sequential Explanatory Interpretation Method* yaitu hasil kalkulasi metode kuantitatif dilanjutkan dengan metode kualitatif agar interpretasi hasil penelitian melalui metode kuantifikasi dengan uji hipotesis didukung dengan hasil wawancara. Untuk lebih menangkap fenomena yang terjadi di lapangan, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan *Sequential Exploratory Interpretation Method*, yaitu dominasi metode kualitatif yang telah dilakukan pada tahap awal dilanjutkan dengan metode kuantitatif untuk mendukung dan mengkonfirmasi hasil kualitatif yang telah dilakukan;
- 2) Hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan, dan kompetensi SDM tidak terlalu mendominasi terhadap kualitas LKKL, memberikan sinyal bahwa terdapat faktor-

faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kualitas LKKL. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan faktor-faktor lain yang diduga berpengaruh, yaitu antara lain kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, komitmen pimpinan, dan sistem pengendalian internal;

- 3) Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah faktor kebermanfaatan LKKL sebagai bagian dari kualitas LKKL, sehingga LKKL tidak dipandang hanya kualitasnya saja yang baik, namun didukung pula oleh kebermfaatannya dalam setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (pemerintah);
- 4) Variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini diukur melalui tiga dimensi, yaitu *software*, proses, dan pemeliharaan. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelaahan yang lebih mendalam, dalam upaya untuk menangkap lebih detail fenomena-fenomena yang terjadi di lingkup pemerintah pusat terkait pemanfaatan teknologi informasi, tentunya dengan mempertimbangkan karakteristik-karakteristik yang ada di pemerintah pusat;
- 5) Responden yang menilai kualitas LKKL dalam penelitian ini adalah pejabat minimal eselon IV di tingkat UAPA di masing-masing kementerian negara/lembaga, yang dalam hal ini adalah penyusun dan penyaji LKKL itu sendiri. Untuk menghindari biasanya penilaian yang mereka lakukan terhadap kualitas LKKL, peneliti selanjutnya dapat menggunakan responden lain untuk menilai kualitas LKKL, antara lain misalnya auditor eksternal (BPK), auditor internal (Itjen dan BPKP), atau *stakeholders* lainnya;
- 6) Hasil penelitian ini menggambarkan secara umum kondisi riil yang ada di seluruh kementerian negara/lembaga, sehingga hasil yang diperoleh sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian serupa yang fokus pada satu atau beberapa kementerian negara/lembaga saja. Hal ini berakibat implikasi pada tataran teknis penelitian ini pun bersifat umum dan *general* yang dapat diterapkan di masing-masing kementerian negara/lembaga.

PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi besar terhadap penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini, antara lain: Dr. Marwanto Harjowiryo, M.A. (Dirjen Perbendaharaan), Drs. Haryana, M.Soc.Sc (Sekretaris Dirjen Perbendaharaan), dan Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., MSc. (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan), serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Bawono, Icuk Rangga. (2011). *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Alves, Maria do Céu Gaspar. (2010). Information Technology Roles in Accounting Tasks - A Multiple-Case Study. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 1, No. 1, June, 2010 2010-023X.
- Nasution, Anwar. (2006). *Korupsi Dapat Dicegah dengan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan*. Seminar Sehari dalam Rangka Brawijaya Accounting Fair, Malang.
- (2009). *Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Era Reformasi*. Dialog Publik Manado.
- Arens, Alvin A., and Loebbecke, James K. (2003). *Auditing An Integrated Approach*. Terjemahan Amir Abadi Jusuf. *Auditing Pendekatan Terpadu*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Azhar. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Susanto, Azhar. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (Audited) Tahun 2014*. Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta.
- Barney, Jay B. (2001). Is the Resource-Based Theory a Useful Perspective for Strategic Management Research? Yes. *Academy of Management Review*, Vol. 26, No. 1, 41-56.
- Behn, Robert D. (1995). The Big Questions of Public Management. *Public Administration Review*, Vol. 55, No. 4 (Jul. - Aug 1995), pp. 313-324.
- Belkaoui, Ahmed R. (2001). *Accounting Theory*, Terjemahan Mawinta, Hajayanti Widiastuti, Heri Kurniawan, Alia Arisanti. *Teori Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Bodnar, G.H dan William S., Hopwood. (1995). *Accounting Information System*. Prentice Hall International. 6th Ed. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Braun, Virginia dan Victoria Clarke. (2006). *Using Thematic Analysis in Psychology*. Dept. of Psychology The University of Auckland, Auckland, NZ and Faculty of Applied Science The University of The West England Frenchay Campus, Bristol, UK.
- Cooper, D.R. dan P.S. Schindler. (2011). *Business Research Methods*. 7th Edition. McGraw Hill International Edition.
- Creswell, John. W dan Vicki L. Plano Clark. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. 2nd Edition. California: Sage Publication, Inc.
- Fatimah, Desi dkk. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3, No. 1, Oktober 2014: 1 - 15
- Gudono. (2014a). *Teori Organisasi*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- (2014b). *Analisis Data Multivariat*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Jogiyanto, Hartono. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Harun. (2009). *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huang, et al. (1999). *Quality and Information and Knowledge*. Upper Saddle River. New Jersey 07458: Prentice Hall PTR.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jama'an. (2008). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, 43-52.
- Kementerian Keuangan. (2015). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (Audited) Tahun 2014*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Lim, Francis Pol C. (2013). Impact of Information Technology on Accounting Systems. *Asia-Pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*. Vol.3, No.2, December (2013), pp. 107-120.
- Loudon, Kenneth C. dan Jane P. Loudon. (2012). *Management Information System: Managing The Digital Firm*. 12th Edition. NJ: Prentice-Hall.
- Mahapatro, Bibhuti Bhusan. (2010). *Human Resources Management*. New Delhi: New Age International (P) Ltd., Publishers.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Immaculata, Maria. (2006). *Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 1 No 3, 2007.
- Meilistya, Mega. (2010). *Kajian Terhadap Suspen dan Upaya Meningkatkan Keandalan Data Laporan Keuangan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mulia P Nasution. (2003). *Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah*. *Jurnal Forum Inovasi*. Vol.5, Desember-Februari 2003.
- O'Brien, James A., dan Marakas, George M. (2010). *Management Information Systems: Managing Information Technology In The Bussiness Enterprise*. 15th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 *Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta
- Nomor 213/PMK.05/2013 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta.
- Nomor 233/PMK.05/2015 *Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Yulianingtyas, Rena R. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Puspita, Rora dan Martani, Dwi. (2012). *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda*. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 20-23 September 2012.
- Mulyani, Sri. (2009). *Sistem Informasi Manajemen (Rumah Sakit: Analisis dan Perancangan)*. Cetakan Ke-I. Bandung: Abdi Sistematika.
- Mulyani, Sri, Hasan, Rohail dan Anugrah, Fajar. (2015). The Critical Success Factor for the Use of Information System and Its Impact on The Organization Performance. *International Business Management 10 (4): 552-560, 2016*. ISSN : 1993-5250, *Medwell Journal 2016*.
- Ross, Stephen. (1977). The Determination of Capital Structure, The Incentive Signalling Approach. *The Bell Journal of Economics*, Vol. 8, No. 1 (Spring, 1977), 23-40.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwardjono. (2013). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Thompson, James D. (1976). *Organization in Action: Social Science Bases of Administrative Theory*. University of Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. Jakarta.
- Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Nomor 15 Tahun 2004 *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, dan Bernard Wong-On-Wing. (2000). *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. 4th Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- William, B.K., dan Sawyer, S. C. (2007). *Using Information Technology*. Terjemahan Nur Wijayaning Rahayu dan Th. Arie Prabawati. *Pengenalan Praktis Dunia Komputer dan Komunikasi*. Edisi 7. Yogyakarta: Andi.
- Wolk, H. I., Tearney, M. G., and Dodd, J. L. (2001). *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach*, 5th Edition, South-Western College Publishing.
- Woodward. J. (1980). *Industrial Organization: Theory and Practice*. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press.